

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Ridho, *“Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf”*, Alumni, Bandung, 1999.
- Cornelis van Vollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan Kerjasama dengan Inkultra Foundation Inc, Jakarta, 1983.
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Dahlan Siamat, *“Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi Kelima”*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Denny Kailimang, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau PKPU*, Alumni, Bandung, 2001.
- Djoko Imbawani Atmadjaja, *“Hukum Dagang Indonesia Sejarah, Pengertian dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang”*, Setara Press, Malang, 2012.
- H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar ilmu hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Hassanain Haykal and Johannes Ibrahim, *“Local Wisdom of Bali and Development of the Banking Institution in Indonesia”*, Lambert Academic Publishing, Mauritius, 2017.
- I Dewa Made Suartha, *“Hukum dan Sanksi Adat”*, Setara Press, Malang, 2015
- I Wayan Surpha, *“Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali”*, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2012
- Isis Ikhwansyah (et.al.), *Hukum Kepailitan Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan*, Keni Media, Bandung, 2012.
- Johanes Ibrahim, *“Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif”*, CV Utomo, Bandung, 2004

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994.
- Martias gelar Iman Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum; Penjelasan-Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia untuk Studi dan Praktik*, PD, Global, Medan, 1969.
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006.
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2010.
- Meray Hendrik Mezak, *Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan, 2006.
- Munir Fuadi, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Riduan Syahrani, *“Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata”*, Alumni, Bandung, 2013.
- Rudi A. Lontoh, (et.al), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Sinungan M, *“Manajemen Dana Bank”*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.

Suyatno Thomas, “*Kelembagaan Perbankan*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1993.

Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta 1994.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Burgerlijke Wetboek (BW), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Wetboek Van Kophandel (WvK), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

C. Jurnal

Tri Widya Kurniasari, *Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Dalam Perspektif Hukum Sebuah Lembaga Keuangan Adat Hindu Penggerak Usaha Sektor*

Informal Di Bali, Jurnal Hukum Masyarakat dan Budaya, Volume 9 No. 1, Tahun 2007, hlm.58.

D. Pranata Luar

- Netralnews.com, “*Di Indonesia Terdapat 1340 Suku*”, 2017, <http://www.netralnews.com/news/rsn/read/71459/di.indonesia.ada.1340.suku.bangsa.dan.300.kelompok.etnik>, Diunduh pada 12 September 2017.
- Aafandia, “*Teori Stufenbau*”, 2010, <https://teorihukum.wordpress.com/2010/07/27/teori-,stufenbau/>, diunduh pada tanggal 19 September 2017.
- Aldhosutra, “*Teori Kepastian Hukum*”, 2017, <https://www.scribd.com/document/353957728/Teori-Kepastian-Hukum#user-util-view-profile>, diunduh pada 19 September 2017.
- Bintang Partogi Mangaratua Sibuea, *Fungsi dan Tujuan Kepailitan*, 2015, <http://www.hukumpedia.com/bintangpartogi/fungsi-dan-tujuan-kepailitan>, diunduh pada 17 Oktober 2017
- D. Prayogo, *Hukum Kepailitan Dan Prinsip Exceptio Non Adempti Contractus*, 2016, <http://repository.unpas.ac.id/14515/3/G.%20BAB%20II%20skripsi.pdf>, di unduh pada 23 oktober 2017
- Dhayana N.D, “*Dasar Hukum LPD*”, 2016, <https://www.scribd.com/document/332608776/Dasar-Hukum-Lembaga-Perkreditan-Desa>, Diunduh pada 13 November 2017.
- Lembaga Perkreditan Desa Desa Pecatu, “*Produk-Produk LPD*”, 2015, <https://www.lpdpecatu.or.id/lpd/produk.php?idproduk=1=7>, Diunduh pada 13 November 2017.
- LPD Pecatu, “*Visi dan Misi LPD*”, 2015, https://www.lpdpecatu.or.id/lpd/tentang_kami.php?idp=15, Diunduh pada 13 November 2017.
- N. Naghfir, “*Kajian Umum Hukum Kepailitan Bab II*”, 2014, <http://etheses.uin-malang.ac.id/348/6/10220067%20Bab%202.pdf>, di unduh pada 17 Oktober 2017.

Repository Universitas Udayana, "Lembaga Perkreditan Desa", 2016,
<http://erepo.unud.ac.id/11213/3/6716f82d2004566d0e6cf8a1c0f3f9af.pdf>,
Diunduh pada 11 November 2017.

Repository Universitas Udayana, "Tinjauan Umum Lembaga Perkreditan Desa
dan Perjanjian Kredit", 2014,
http://erepo.unud.ac.id/16510/3/0990561068-3-BAB_II.pdf, diunduh
pada 29 November 2017.

